

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa kolonial di Indonesia, sistem pemerintahan didasarkan pada prinsip sentralistik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Periode kolonial ini, terutama diawali dengan kedatangan Belanda pada abad ke 17, membentuk dasar sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan otoriter, Indonesia diperintah secara sentralistik dengan gubernur jenderal sebagai pemimpin tertinggi.¹

Dalam proses yang panjang, pembentukan negara Kolonial Belanda dilakukan dalam dua tahap yaitu eksternal dan internal. Secara eksternal berlangsung pada abad-19 melalui serangkaian perjanjian perbatasan yang beririsan dengan penguasa kolonial Inggris, Spanyol, Jerman, dan Portugis di kawasan Asia Tenggara, dan secara internal dilakukan perjanjian-perjanjian politik dengan kerajaan-kerajaan independen di Nusantara yang diselesaikan melalui jalur militer maupun diplomatik.²

Pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda melakukan upaya untuk menguasai seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Perluasan wilayah dan kekuasaan bukan hanya bertujuan untuk menguasai secara langsung seluruh daerah, melainkan untuk mencegah masuknya pengaruh politik bangsa asing lainnya pada kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam rangka perluasan wilayah tersebut Hindia Belanda mempersiapkan ekspedisi militer untuk memaksa dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Terutama yang tidak bersedia menyerahkan kekuasaannya atau yang belum dikuasai secara langsung.³

¹ Hari Suriadi, dkk., "Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Jurnal Media Ilmu*, Vol. 2, No. 2 (2023), 197.

² Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), *Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Serie Grote Bundel 1862–1960*, (Jakarta: ANRI, 2023), 1.

³ Muhammad Amir, Dkk, "Konflik dan Relasi Kekuasaan di Ajatappareng 1905-1942", *Seminar Series in Humanities and Social Sciences* No. 1, (2019), 69.

Usaha perluasan kekuasaan bertujuan menciptakan keamanan untuk menjamin berhasilnya usaha penanaman modal swasta Belanda dan modal asing lainnya di Indonesia, menguasai tanah yang berpotensi untuk usaha pertanian, perkebunan, pertambangan, dan dalam rangka memperluas usaha penanaman modal. Sulawesi Selatan sebagai daerah yang potensial untuk penanaman modal di bidang pertanian dan perkebunan tidak terlepas dari usaha perluasan kekuasaan Hindia Belanda.⁴

Perluasan kekuasaan Pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan mengubah pola ekonomi politik. Ekonomi politik masyarakat Sulawesi Selatan yang berorientasi pada sistem tradisional kerajaan berubah menjadi sistem ekonomi politik kolonial. Ekonomi politik adalah gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai kebergantungan antara ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi. Secara umum, ekonomi politik adalah mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang dilakukan pemerintah.⁵

Pemerintah Belanda mengajukan susunan pemerintah baru dalam penata laksanaan pemerintahan, Gubernur Jenderal H.N.A. Swart mengeluarkan surat keputusan tentang pembagian wilayah pada tanggal 31 Desember 1906. No. 6041/2.⁶ Secara keseluruhan Sulawesi Selatan telah berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pembagian itu terbagi atas pemerintahan Sulawesi dan daerah bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*), departemen (*Afdeeling*), bagian departemen (*Onderafdeeling*), daerah adat (*Adatgemeenschap*), dan kampung (*Kampong*).⁷

⁴ Drs Muh Abduh, Dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1985), 96.

⁵ Dr. Muslim Mufti, M.Si, *Ekonomi Politik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 3.

⁶ Nur Laely, "Sistem Pemerintahan Kolonial Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.6, Edisi 1(2023), 15.

⁷ Edward L. Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), 83-84.

Sulawesi terbagi atas *Afdeeling* Parepare, Makassar, *Bonthain*, Bone, Mandar, Luwu, Buton, Laiwui. *Afdeeling Bonthain* terbagi atas beberapa *Onderafdeeling* yakni Selayar, Bulukumba, Sinjai, Jeneponto, dan *Bonthain*. Dalam menjalankan pemerintahan setiap *Onderafdeeling* dibantu oleh *Kontrolir* Bersama aparatnya yang disebut *Opu* atau *karaeng*.⁸ Keberadaan Hindia Belanda di Sulawesi Selatan meluas hingga terbentuklah daerah-daerah bawahan. Salah satunya yaitu *Bonthain*. Sebelum masuknya Hindia Belanda, *Bonthain* dikenal dengan sebutan *Bantayang*. Namun pada masa Kolonial Belanda *Bantayang* berubah menjadi *Bonthain*.

Sistem pemerintahan yang digunakan di *Bonthain* sebelum Belanda masuk yaitu sistem pemerintahan kakaraengan. Dalam *Rappang Ri Bantaeng* dijelaskan raja *Bonthain* pertama dikenal dengan sebutan *To Manurung Ri Onto*. Dengan bentuk pemerintahan yaitu absolut monarki, yang berarti segala kekuasaan berasal dari raja. Dalam sistem pemerintahan kakaraengan *Bonthain* strukturnya terdiri dari Raja sebagai pemegang kekuasaan, *Gallarang*, *Djannang*, dan *Sulewatang*. Dikenal adat *sampulo ruwa* yang berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mawadahi kontrak politik antara raja dengan rakyat *Bonthain*.⁹

Dibawa kekuasaan Hindia Belanda sistem pemerintahan *Bonthain* tetap pada sistem pemerintahan lokal yang telah berlaku sebelumnya. Namun Hindia Belanda menempatkan seseorang sebagai Asisten Residen yang bertugas untuk mengontrol jalannya pemerintahan di *Afdeeling Bonthain*. Dan seorang *Kontrolir* yang bertugas mengontrol *Onderafdeeling Bonthain*.¹⁰ Pada saat itu perubahan sistem pemerintahan *Bonthain* secara administratif diatur oleh Hindia Belanda.

Perubahan pada tatanan birokrasi diikuti dengan perubahan pada sektor ekonomi. Hal tersebut bermula pada tahun 1900 pemerintah di Makassar menyebarkan informasi

⁸ Najamuddin, Dkk, *Sulawesi Selatan Tempo Doeloe* (Makassar: Rayhan Intermedia, 2016), 70.

⁹ Laely, "*Sistem Pemerintahan Kolonial*", 8.

¹⁰ Khaerul Amri, "Kolonialisme Mencengkrum Tellu Limpoe: Perubahan Politik dan Tatanan Birokrasi Pemerintahan di Sinjai, Sulawesi Selatan 1861-1942", *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, Vol.7, No.2, (2021), 145.

kepada kerajaan-kerajaan sekutu dan sahabat bahwa kebijakan pelabuhan bebas akan dihapuskan dan akan dibebankan uang ganti rugi atas pungutan pajak impor-ekspor, cukai, pajak pelabuhan, pajak jangkar, dan ketentuan lainnya terkait pelayaran dan perdagangan. Ganti rugi ini pada dasarnya langkah politik untuk menegaskan bahwa wilayah-wilayah kerajaan sekutu dan sahabat berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.¹¹

Dalam suratnya kepada Direktur Departemen Keuangan Gubernur Jenderal Van Heutza menyatakan bahwa sesuai dengan keinginan Menteri Koloni, maka secepat mungkin dilakukan kontrak dengan penguasa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan untuk mengambil alih hak pajak perdagangan, serta mempersiapkan agar pelaksanaan pemungutan pajak perdagangan dapat dilaksanakan pada 1 Januari 1906. Direktur Departemen Keuangan, dalam pertimbangannya, bahwa demi menjamin kepentingan perdagangan maka kerajaan-kerajaan berdaulat harus bersedia mengakui hak pemerintah Hindia Belanda untuk memungut pajak perdagangan di wilayah kekuasaan mereka.¹²

Sejak masuknya kolonial Belanda di Sulawesi Selatan, pajak menjadi sumber utama pendapatan kas negara Hindia Belanda. Namun, pada periode 1906-1916, penataan pajak di wilayah tersebut masih bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dari pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda, termasuk keluarnya peraturan baru mengenai ordonasi pajak penghasilan (*Ordonantie Inkomstenbelasting*) tahun 1908. Pajak ini sebenarnya bukan merupakan peraturan perpajakan yang baru. Peraturan tersebut merupakan pengembangan dari peraturan pajak yang sudah ada sebelumnya, yang dikenal dengan Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908.¹³

Kekuasaan Kolonial Belanda melakukan perbaikan agraria melalui pengurangan kekuasaan politik pada raja. Raja yang memiliki kekuasaan terhadap tanah dikurangi oleh Belanda dan diganti dalam bentuk gaji. Hak penguasaan tanah raja-raja Sulawesi Selatan

¹¹ Edward, L. Poelinggomang, *Makassar abad XIX* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), 75.

¹² Amir, Dkk, *Konflik dan Relasi Kekuasaan di Ajatappareng 1905-1942*, 73.

¹³ Nadia Ayu Christine, "Latar Belakang Penerapan Ordonasi Pajak Penghasilan di Hindia Belanda tahun 1908-1942", *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 2014 Volume 2, No 1, 140.

setelah penaklukan Belanda membuat konsentrasi dan akumulasi tanah meningkat.¹⁴ Kebijakan ini menyebabkan hilangnya sumber pendapatan bangsawan dan pejabat lokal. Sebelum Hindia Belanda berkuasa di *Bonthain* pejabat lokal mengambil alih pajak atas tanah rakyat atau memungut upah pertanian maka setelah pengambilan kekuasaan oleh pihak Belanda pajak hasil pertanian untuk pemerintah Belanda.

Pada tahun 1910 misalnya di bagian barat distrik *Bonthain* pengelola dalam hal ini pribumi menerima 2/3 hasil panen, di bagian timur *Bonthain* yaitu Mapaliwang dan Nipani hanya mendapatkan separuh dari hasil panen. Masyarakat membayar pajak beras sesuai dengan bagiannya masing-masing. Untuk pemeliharaan kebun yang sudah ada, 5 sen atau 1 gentu per pohon dibayarkan di distrik *Bonthain*.¹⁵

Kebijakan adat lokal yang sebelumnya berperan dalam kehidupan masyarakat seringkali harus beradaptasi dengan struktur kekuasaan kolonial. Hal ini menciptakan dinamika baru, di mana masyarakat lokal harus menyesuaikan diri dengan sistem birokrasi modern yang diperkenalkan oleh Belanda. Namun, kebijakan kolonial seringkali membawa dampak yang tidak seimbang, di mana sebagian besar keuntungan ekonomi dirasakan oleh pihak kolonial, sementara masyarakat lokal tetap berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan.

1.2. Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Dikuasainya *Bonthain* oleh Belanda mengubah banyak tatanan kehidupan masyarakat *Bonthain*. Dimulai dari tatanan pemerintah hingga sosial dan ekonomi politik. *Bonthain* yang dulunya kerajaan yang berdiri sendiri kemudian berubah menjadi dibawah pengawasan Belanda. Meskipun sistem pemerintahan yang diberlakukan tetap mengacu kepada pemerintahan lokal tetapi tetap diawasi oleh pejabat pemerintahan Hindia Belanda yang bertanggung jawab di pusat pemerintahan *Bonthain*. Adanya Belanda tentu mengubah kebijakan-kebijakan tradisional yang dulunya berfokus pada kebijakan kerajaan, kemudian diambil alih menjadi kebijakan kolonial.

¹⁴ Razif, Dkk, *Sejarah Geografi Agraria Indonesia* (Yogyakarta: STPN Press, 2017), 103-104.

¹⁵ *Pandecten Van Het Adatrecht* (Amsterdam: Kolonial Instituut, Mededeeling No.4, Afdeling Volkenkunde No.2, 1918) 85-86.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan ekonomi politik pemerintah Hindia Belanda di *Bonthain* 1906-1942?

Dalam penelitian sejarah tentunya diperlukan ruang lingkup penelitian, itu terdiri dari batas temporal dan ruang dalam penelitian tersebut. Adapun batas temporal pada penelitian adalah 1906 hingga 1942. Tahun 1906 Belanda melancarkan ekspedisi militer di *Bonthain* dengan tujuan memperluas kendali atas kerajaan lokal, sejak saat itu Belanda menguasai pada aspek politik, ekonomi, kehidupan sosial, dan budaya masyarakat. Tahun 1942 menjadi batas akhir dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun berakhirnya penguasaan pemerintah kolonial di *Bonthain*.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan mendeskripsikan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada masa kolonial Hindia Belanda di *Bonthain*. Fokus kajian pada tulisan ini adalah terkait kebijakan ekonomi politik Hindia Belanda pada tahun 1906-1942. Dengan melihat gambaran ekonomi *Bonthain* sebelum 1906, perubahan apa saja yang terjadi ketika Belanda secara resmi mengatur *Bonthain* dalam hal tatanan pemerintahan hingga ekonomi politik,

1.3. 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami sejarah ekonomi politik *Bonthain*. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya, pembuat kebijakan, dan masyarakat yang tertarik dengan sejarah dan perkembangan wilayah *Bonthain* khususnya di sektor ekonomi.

1.4. Tinjauan Pustaka

Tulisan mengenai sejarah kolonial telah banyak ditulis oleh peneliti. Khususnya sejarah ekonomi politik masa kolonial juga sudah banyak referensi. Namun tulisan mengenai sejarah kolonial di *Bonthain* masih sangat minim khususnya yang membahas tentang ekonomi politik. Hal tersebut menjadi daya tarik penulis untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana keadaan ekonomi di *Bonthain* selama masa kolonial.

Penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas tentang sejarah *Bonthain* Masa kolonial seperti tulisan Nur Laely yang berjudul “Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Dalam *Onderafdeeling Bonthain* 1905-1942”. Tulisan ini membahas tentang sistem pemerintahan tradisional *Bonthain* dan membahas bagaimana perubahan sistem pemerintahan tersebut setelah masuknya Kolonial Belanda. Dalam tulisannya Nur Laely menjelaskan pemerintahan tradisional *Bonthain* yang dimulai sejak adanya *To Manurung* hingga penguasaan pemerintah Kolonial Belanda, ketika *Bonthain* berubah menjadi *Onderafdeeling Bonthain*.

Lain halnya dengan tulisan Rustan yang berjudul “Perkembangan *Bonthain* pada masa Kolonial Belanda 1905-1942”. Tulisan ini membahas tentang perubahan morfologi kota kolonial *Bonthain* dan perubahan tata ruang dan infrastruktur kota Kolonial Belanda. Pada tulisan Rustan juga sedikit di bahas persoalan pemerintahan *Bonthain* pada masa kolonial dan perkembangannya dari zaman VOC.

Selanjutnya yaitu tulisan Andi Syahrul Akbar yang berjudul “Sejarah perekonomian di Bone 1906-1942”. Tulisan ini membahas tentang bagaimana perekonomian Bone sebelum Hindia Belanda dan perekonomian Bone setelah adanya Hindia Belanda. Tulisan ini juga membahas tentang kebijakan kolonial yang mempengaruhi ekonomi Bone.

Buku dengan judul “Sejarah geografi agraria Indonesia” karya Razif sangat membantu dalam proses penulisan. Buku ini membahas tentang sejarah agraria di Indonesia secara umum, dan kebijakan agraria di beberapa daerah di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan kebijakan agraria Sulawesi Selatan terkhusus dalam konteks kolonial.

Penulis juga banyak menggunakan arsip-arsip Belanda dalam proses penulisan karya tulis ini. Adapun arsip yang digunakan yaitu seperti *memorie van overgave Bonthain* 1931-1932 yang ditulis oleh Boterhoven, C, De Haan. Arsip ini sangat membantu dalam kepenulisan karya tulis ini karena arsip ini memberikan informasi mengenai pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sistem tradisional *Bonthain*.

Arsip selanjutnya yang digunakan dalam tulisan ini, khususnya dalam penulisan bab 4 yaitu arsip yang berjudul *Pandacten Van Het Adatcrecht*. Arsip ini membahas tentang sistem tradisional di *Bonthain* seperti sistem kepemilikan tanah, pembagian hasil masa kerajaan, dan peran raja dalam ekonomi masyarakat *Bonthain*.

Jika membahas mengenai konsep pemerintahan tradisional, arsip yang menjadi sumber bagi penulis yaitu *Adatrechtbundels XXXVI* karya Gravenhage dan Nijhoff. Dalam arsip ini dipaparkan dengan jelas kondisi *Bonthain* dari masa *To Manurung* hingga berkuasanya Hindia Belanda. Selain itu, arsip ini juga membahas tentang asal mula pembukaan lahan kopi di *Bonthain*.

1.5. Sumber Penulisan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian sejarah berupa pencarian sumber melalui studi pustaka dan studi arsip, penulis melakukan pencarian dan pengumpulan data terkait kebijakan ekonomi politik *Bonthain* masa kolonial. Sumber-sumber yang digunakan yaitu arsip, buku, jurnal, dan koran yang relevan dengan objek yang diteliti. Penulis melakukan pencarian di Dinas perpustakaan dan arsip Provinsi Sulawesi Selatan, Delpher, situs penyedia arsip Belanda, Arhcieveren, dan situs penyedia arsip nasional.

Kritik Sumber, pada tahap ini yang dilakukan oleh penulis adalah melihat kembali sumber yang telah dikumpulkan kemudian menelaah apakah relevan dengan pembahasan yang akan ditulis. Kritik terbagi atas dua yaitu, kritik eksternal dan internal. Pada kritik eksternal penulis melakukan pemeriksaan terhadap asal usul sumber yang didapatkan, sedangkan pada kritik internal penulis mengidentifikasi isi dari sumber yang didapatkan.

Interpretasi, pada tahap ini data yang diperoleh kemudian di analisis. Dalam proses interpretasi peneliti menjabarkan data-data yang didapat serta menghubungkan antara satu data dengan data lainnya. Terakhir, historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dalam metode penelitian sejarah. tahapan historiografi itu ialah tahapan kegiatan penulisan. Hasil penafsiran atas fakta-fakta tersebut kita tuliskan menjadi suatu tulisan sejarah yang selaras.

1.6. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab. Pada bab pertama, berisi tentang pendahuluan yaitu memberikan gambaran awal mengenai apa yang akan diteliti dan ditulis. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab kedua, penulis akan menguraikan tentang kerajaan *Bonthain*, pemerintah Hindia Belanda, dan kondisi geografis *Bonthain*,

agama, pendidikan, strata sosial di *Bonthein*. Bab ketiga, penulis akan menjelaskan tentang kebijakan agraria tradisional. Dalam hal ini, kebijakan tradisional *Bonthein* dalam hal kepemilikan tanah dan pembagian hasil panen.

Selanjutnya, pada bab empat, membahas tentang kebijakan ekonomi politik Hindia Belanda di *Bonthein*. Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai kebijakan kolonial dalam ekonomi *Bonthein* dari pajak, komoditi, dan kebijakan tentang komoditi yang ada *Bonthein*. Dan, bab lima yaitu penutup, berisi kesimpulan dari tulisan mengenai kebijakan ekonomi politik *Bonthein* 1906-1942.

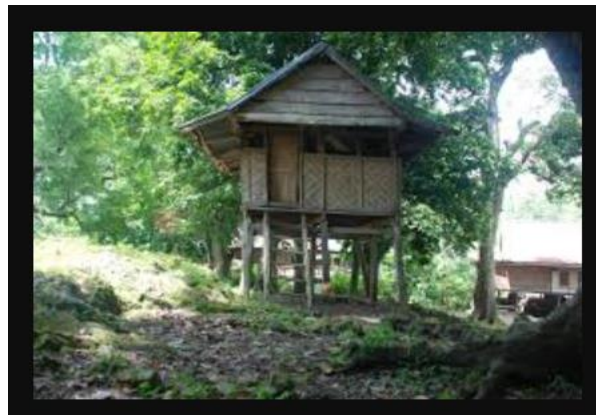
BAB II

SEJARAH AWAL *BONTHAIN* DAN GAMBARAN UMUM *ONDERAFDEELING BONTHAIN*

2.1. Kerajaan *Bonthain*

2.1.1. Awal Mula *To Manurung*

Bantayang atau dalam bahasa Belanda di sebut *Bonthain* adalah tanah tua yang terletak di ujung Sulawesi Selatan. Dalam kitab *Negarakertagama Bonthain* disebutkan sebagai salah satu daerah yang pernah di taklukan oleh Majapahit. Hal tersebut tidak terlepas dari kekayaan alam *Bonthain* yang melimpah. Pada periode setelah perang Makassar *Bonthain* menjadi salah satu daerah pengekspor beras untuk kerajaan Gowa. Kebesaran kerajaan *Bonthain* tidak terlepas dari cerita masa lalu yang mengakar kuat hingga kini. Salah satunya yaitu mitos *To Manurung*. Konsep *To Manurung* adalah budaya lokal masyarakat Sulawesi Selatan. *To Manurung* sering digambarkan sebagai seseorang yang turun dari langit. Dalam laporan orang Belanda yaitu O.M. Goedhart dengan judul *De Inlandsche Rechtsgemeenschappen In De Onderafdeeling Bonthain* yang terbit tahun 1920 menjelaskan tentang komunitas adat pribumi di *Bonthain*.¹⁶



¹⁶ Martinus Nijhoff, *Adatrechtbundels XXXI: Selebes*, (Instituut Voor De Taal Land En Volkenkunde Van Nederlandsch Indie, 1929), 156.

Gambar. 2.1. Potret Balla Tujua Onto, (Sumber: Diakses pada <https://www.arsy.co.id/2015/07/kawasan-balla-tujua-ri-onto-Bonthain.html>)

Pemukiman Onto sebagai salah satu daerah tertua di *Bonthain* menjadi tempat awal *To Manurung* menginjakkan kakinya. Masa itu masyarakat Sulawesi Selatan, *Bonthain* khususnya belum memeluk agama Islam. Di Onto *To Manurung* memulai pengembaraannya. *To Manurung* mulai menjajaki daerah selain Onto seperti Karatuang, Bonto Sunggu, dan Lidoeloe yang merupakan daerah pemukiman Bissampole. Pemukiman Bissampole yang juga sudah ada sebelumnya dipilih *To Manurung* sebagai daerah tempat tinggalnya. Keberadaan *To Manurung* disambut baik oleh masyarakat sekitar. Orang-orang membangunkan rumah besar untuknya, yang akan ditempati bersama *Pole*. *Pole* adalah seorang pria berasal dari Karatuang yang mengikuti *To Manurung* hingga ke Bissampole.¹⁷

Penduduk terkemuka yang disebut *To Mangada* berjumlah dua belas orang, setiap harinya mengunjungi *To Manurung*. Karena kesusahan melihat dua belas *To Mangada* tersebut bolak balik setiap harinya, *To Manurung* menyarankan untuk menunjuk satu orang menjadi wakilnya. Atas arahan tersebut *To Mangada* kemudian memilih satu orang yang berasal dari Karatuang dan di beri gelar *To Ni Gallaraka*. *Pole* dan *To Ni Gallaraka* duduk berdampingan dengan *To Manurung* dan tinggal bersama. Mereka senantiasa ikut dalam setiap agenda penting *To Manurung* dengan para *To Mangada*.¹⁸

Suatu waktu *To Manurung* hilang secara misterius. *Pole* dan *Gallaraka* tetap tinggal di rumah tersebut. Namun kedamaian yang senantiasa hadir selama bersama *To Manurung* berubah menjadi pertikaian. Hal tersebut dikarenakan keduanya ingin berkuasa. Sedangkan, ke dua belas *To Mangada* tersebut membangun perkampungan baru yang diberi nama Tanga-tanga, Mamampang, Tabaringang, Karunrung, Tompong, Mapilawing, Katapang, Tino, Lemowa, Marawa, dan Borong Loe.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, 156.

¹⁸ *Ibid*, 156.

¹⁹ *Ibid*, 158.

Empat puluh hari setelah hilangnya *To Manurung*, *Pole* dan *To Ni Gallaraka* mendapat pesan bahwasanya “*To Manurung* sudah tidak kembali ke bumi. *Pole* diberikan tugas menjadi *Djannang Bissampole*, sedangkan *To Ni Gallaraka* diberi tugas untuk tetap memimpin dua belas *To Mangada* dan mereka akan terus memimpin pemukiman yang telah mereka buat dengan gelar *Djannang*. Sebagai Karaeng *Bonthain*, *To Manurung* memerintahkan untuk memilih salah satu dari sembilan orang yang semuanya bersaudara dan tinggal di Karantuang untuk menggantikannya”.²⁰

Atas perintah tersebut *Pole*, *To Ni Gallaraka*, dan kedua belas *To Mangada* mengadakan pertemuan. Setelah menyampaikan pesan dari *To Manurung* kepada *To Mangada*, *Pole* dan *To Ni Gallaraka* berpendapat bahwa lebih baik para *To Mangada* yang memilih dan menentukan siapa yang diangkat menjadi karaeng *Bonthain*. Hal tersebut disetujui oleh para *To Mangada*. Dan akan diadakan pertemuan kembali di Bissampole dengan menghadirkan sembilan saudara tersebut.²¹

Pada pertemuan berikutnya yang diadakan bersama *Pole*, *To Ni Gallaraka*, *To Mangada*, dan sembilan bersaudara tersebut. Di putuskan untuk mengangkat saudara tertua dari mereka untuk menjadi Karaeng *Bonthain*. Massanigaya sebagai seseorang yang di tunjuk untuk menjadi Karaeng *Bonthain* meminta izin untuk memberitahukan kepada ayahnya sebelum menerima tawaran tersebut. Karena telah mendapatkan izin untuk menjadi karaeng. Massanigaya dibawa oleh *Pole*, *To Ni Gallaraka*, dan *To Mangada* ke rumah *To Manurung* di Bissampole.²²

To Manurung merupakan dasar ideologi politik yang mendukung bangkitnya kerajaan dan lahirnya masyarakat berjenjang yang kompleks pada beberapa daerah di *Bonthain*. Menurut kepercayaan *Patuntung*, bangsa penguasa setempat didirikan oleh dewa atau *To Manurung* yang secara harfiah berarti orang yang turun dari langit. *To Manurung* bergelar Karaeng Loe. Raja-raja di *Bonthain* mengaku keturunan *To Manurung* untuk membuktikan statusnya dan menguatkan kedudukan mereka yang ditinggikan dalam

²⁰ *Ibid*, 158.

²¹ *Ibid*, 158.

²² *Ibid*, 159.

masyarakat. Ada pula benda peninggalan *To Manurung* yaitu *Kalompoang* (religia), pusaka ini memberikan legitimasi atas kedudukan keluarga raja dan kekuasaan para pemimpin.²³

2.1.2. Pemerintah Kakaraengan *Bonthain*

Pada awalnya *Bonthain* terdiri atas sejumlah pemukiman yang masing-masing berhubungan dengan salah satu sungai atau anak sungai yang mencirikan *Bonthain* secara geografis. Sungai-sungai berasal dari lereng-lereng gunung Lompobattang. Sungai-sungai ini berkelok menuruni lereng gunung. Setelah beberapa waktu, pemukiman-pemukiman sepanjang anak sungai bersatu menjadi kerajaan sungai yang kecil. Tiap kerajaan berpusat pada satu lembah sungai dan pada dasarnya tidak tergantung pada kerajaan sungai yang lain.²⁴

Pusat kerajaan *Bonthain* belum dapat dipastikan secara jelas. Namun menurut cerita rakyat ada tiga kawasan yang menjadi cikal bakal kerajaan *Bonthain*, yaitu kawasan *Bonthain* Timur, *Bonthain* Tengah, dan Kawasan *Bonthain* Barat. Di bagian *Bonthain* Timur sebuah kerajaan mendiami dataran sungai Biangkeke, sekarang menjadi kampung Gantarang Keke. Kerajaan kedua di *Bonthain* Tengah, menyatukan desa-desa sepanjang daerah aliran sungai Calendu. Pusat kerajaan ini awalnya jauh di pedalaman, daerah Onto dan kemudian pindah ke Bissampole dan Lembang Cina di daerah pantai. Pusat ketiga di *Bonthain* bagian barat, di daerah sungai Panaikang, yang awalnya berpusat di Sinoa tetapi berpindah ke bukit berbenteng dekat pantai, dikenal dengan nama Kaili.²⁵

Pada *Rappang Ri Bonthain*, menjelaskan bahwa peletak dasar kehidupan pemerintahan bagi daerah *Bonthain* dikenal dengan nama *To Manurung Ri Onto*, seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa *To Manurung* adalah raja

²³ Mahmud, Dkk, *Bonthain Masa Prasejarah ke Masa Islam*, 90.

²⁴ *Ibid*, 102.

²⁵ *Ibid*, 102.

Bonthain pertama. Bentuk pemerintahan yang berlangsung pada saat itu monarki absolut (kekaisaran absolut), artinya segala kekuasaan berasal dari atas, yaitu raja.²⁶

Dalam sistem pemerintahan Kakaraengan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Dasar-dasar pemerintahan Kerajaan *Bonthain* berdasarkan adat-istiadat dan hubungan internal kerajaan dengan rakyat dalam semua aspek kehidupan. Hubungan satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Adapun struktur Kerajaan *Bonthain* atau jabatan-jabatan dibawa raja atau karaeng adalah:

- a. *Gallarang*, fungsi dari *gallarang* (orang yang diberi gelar dewan adat) di pemerintahan kerajaan *Bonthain* hampir sama dengan kedudukan perdana menteri. *Gallarang* ditunjuk dan dipilih oleh adat *sampulo ruwa* (adat 12). Ketika terpilih *Gallarang* berwenang sebagai wakil karaeng dalam menjalankan pemerintahan dan berkedudukan di Istana.
- b. *Karaeng Sulewatang*, arti *Sulewatang* adalah pengganti yang kuat, fungsi dan tugas *Sulewatang* dalam pemerintahan kerajaan *Bonthain* adalah menggantikan Karaeng bila Karaeng atau Raja tidak ada atau sakit. Di dalam menjalankan tugasnya *Sulewatang* hanya memerintah daerah-daerah rendah saja.
- c. *Karaeng Tompobulu*, adalah Karaeng yang memerintah daerah-daerah pegunungan. Adapun tugasnya hampir sama dengan Karaeng *Sulewatang* yaitu sebagai kepala daerah di dalam wilayah kekuasaannya.²⁷

²⁶ Laely, *Sistem Pemerintahan Kolonial Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*, 76.

²⁷ H. M. Alwy Amien, "Peranan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Bonthain Sulsel" (No.3, 1991), 50.



Gambar. 2.2. Balla Lompoa, (Sumber: Widya Nayati, *Social Dynamics and Local Trading Pattern in the Bonthain Region, South Sulawesi (Indonesia)*, 2005)

Tabel.2.1. Nama Raja-raja *Bonthain*

No	Nama/Karaeng	Masa Jabatan
1	To Toa (Mula Tau)	1254-1293
2	Massanigaya	1293
3	<i>To Manurung</i> Karaeng Loe	1293-1332
4	Massaniga Maratuang	1332-1362
5	Maradiya	1368-1397
6	Massadigaya	1397-1425
7	I Janggong Karaeng Loea	1425-1453
8	Massaniga Karaeng Niaga	1453-1482
9	Daeng Ta Karaeng Putu Dala, Puangta Dolanga	1482-1509
10	Tutinrowa Ri Jalanjang Karaeng Pueya	1509-1532
11	Daeng Ta Karaeng Dewata	1532-1560
12	Karaeng Bondenga Tu Nitambanga	1560-1576
13	I Marawang Karaeng Barrang Tuma Parisika Bongkona	1576-1590

14	Massakirang Daeng Mamangung Karaeng Majjombeya Matinro Ri Jalanjang Latenri Ruwa	1590-1620
15	Daeng Ta Karaeng Bonang Karaeng Loea	1620-1652
16	Daeng Ta Karaeng Baso to Ilanga Ritamalangnge	1652-1670
17	Makkawani Daeng Talele	1670-1672
18	Daeng Ta Karaeng Baso	1672-1687
19	Daeng Ta Karaeng Ngalle	1687-1724
20	Daeng Ta Manangkasi	1724-1756
21	Daeng Ta Karaeng Loka	1756-1787
22	I Balaga Daeng Manguluang Tunijalloka Ri Kajang	1787-1825
23	Petta Tjalleng To Mangngulling Karaeng Tallu Dongkokanna Ri <i>Bonthain</i> Karaeng Loeya ri Lembang	1825-1826
24	Daeng To Nace (Janda Permaisuri Karaeng Balaga Daeng Manguluang Tunijalloka ri Kajang)	1826-1830
25	Mappaumba Daeng To Magassing	1830-1850
26	Daeng To Pasaurang	1850-1860
27	Karaeng Basunu	1860-1866
28	Karaeng Butung	1866-1877
29	Karaeng Butung	1877-1913
30	Karaeng Pawiloi	1913-1933
31	Karaeng Mangkala	1933-1939
32	Karaeng Andi Manappiang	1939-1945
33	Karaeng Pawiloi (Kedua kalinya)	1945-1950
34	Karaeng Andi Manappiang (kedua kalinya)	1950-1952
35	Karaeng Massualle (pelaksana tugas)	1952

Sumber: Nur Laely, Sistem Pemerintahan Kolonial Belanda di Onderafdeling *Bonthain* 1905-1942, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.6, Edisi 1(2023)

Pada awalnya, Kerajaan *Bonthain* hanya terdiri dari pemukiman onto, Bisampole, dan 12 kerajaan kecil yang berasal dari bisampole. Kemudian beberapa pemukiman seperti

Lembang, Lasepang, Biangkeke, secara sukarela menempatkan diri di bawah perintah Karaeng *Bonthain*, dan para pemimpin mereka memperoleh gelar *Djannang*. Meskipun begitu mereka tetap berdiri sendiri dan tidak tergabung dalam *Gallarang Bonthain*.²⁸

Setelah di bawah perintah Karaeng *Bonthain*, *Gallarang* dari *Bonthain* dan 12 *Djannang* di bawahnya bersama-sama membentuk hadat, 12 *Djannang* tersebut disebut adat *sampoeloruwa*. Adat *sampoeloruwa* memiliki wewenang yang sama dengan *Gallarang Bonthain* yaitu memiliki hak untuk menunjuk dan memberhentikan Karaeng *Bonthain*. Jika jabatan tersebut kosong dan mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang siapa yang akan mendudukinya, mereka menunjuk seseorang yang ditugaskan secara sementara untuk menjalankan tugas sebagai karaeng. Seseorang yang ditunjuk tersebut sementara menjalankan tugas sebagai karaeng. Orang tersebut menyandang gelas *Dela Bonthain* dan bertindak sebagai karaeng sebelum kesepakatan tentang pemilihan karaeng tercapai.²⁹

Namun setelah *Bonthain* mengakui kekuasaan tertinggi Gowa, penunjukan, pemberhentian, dan kematian Karaeng atau *Dela Bonthain* harus diberitahukan kepada raja Gowa. Pada tahun 1667, Gowa melepaskan kekuasaan tersebut kepada *O.1. Compagnie*, yang memberikan wilayah tersebut sebagai pinjaman kepada sekutunya, Aroe Palakka, Raja Bone. Sejak saat itu, Hadat dari *Bonthain* harus memberitahukan penunjukan dan pemecatan atau kematian Karaeng kepada Raja Bone.³⁰

2.2. PEMERINTAH HINDIA BELANDA

Pendudukan Belanda di *Bonthain* bermula dari pecahnya perang Makassar antara kerajaan Gowa dengan VOC yang bersekutu dengan kerajaan Bone pada tahun 1666. Selain melakukan peperangan secara terbuka, VOC melakukan penyerangan terhadap kekuatan kerajaan Gowa yang kuat. Belanda menyerang beberapa daerah yang dianggap

²⁸ O.M. Goedhart, *De Inlandsche Rechtegemeenschappen In De Onderadeeling Bonthain*, 1920, 7.

²⁹ *Ibid*, 7.

³⁰ *Ibid*, 8.

pertahanannya lemah, salah satunya *Bonthain*. Dengan melumpuhkan *Bonthain* berarti melumpuhkan sumber kehidupan kerajaan Gowa.³¹



Peta. 2.1. Peta *Bonthain* Abad 18 (**Sumber:** Hasrianti, Syahrudin Mansyur, *Jejak Kolonial Belanda di Timur Laut Teluk Bonthain*, *Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara*, 2020)

Pasukan VOC mendarat di *Bonthain* pada tanggal 25 Desember 1666 di bawah komando Speelman, mereka segera menyerang dan merebut *Bonthain* dari pasukan Gowa dengan bantuan Arung Palakka. Dalam dua tahun setelah pendudukan, pada tahun 1668 *Bonthain* resmi berada di bawah kendali VOC dan pada 1773 didirikan *Departemen Bonthain*.

Pengaturan wilayah berdasarkan perjanjian Bongayya, jelas bahwa wilayah yang dinyatakan berada dibawah kekuasaan VOC adalah daerah-daerah mengelilingi wilayah kerajaan Gowa. Bagian timur disebut dengan nama *Ooster Districten* (Distrik-distrik bagian timur), *Noorder Districten* (Distrik-distrik bagian utara), dan *Zuider Districten* (Distrik-distrik bagian selatan). Berdasarkan pembagian VOC *Bonthain* termasuk ke dalam distrik bagian timur. Posisi *Bonthain* ditempatkan sebagai kerajaan yang dikuasai langsung oleh kompeni.

Wilayah *Bonthain* merupakan daerah yang heterogen. Dapat dibedakan menjadi tiga

³¹ Hasrianti dan Syahrudin Mansyurib, "Jalur Kolonial Belanda di Timur Laut Teluk Bonthain", *Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara*, No.18, Vol.1, (2020), 15.

bagian

- *Bonthain* dulu termasuk bagian dari Makassar, namun pada saat VOC menguasai Sulawesi Selatan, *Bonthain* diserahkan kepada kompeni oleh penguasa Gowa berdasarkan pasal 20 Perjanjian Bongayya pada tanggal 18 November 1667.
- *Bonthain* juga pernah diserahkan kepada Bone oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan kontrak Pallakka tanggal 13 dan 20 Februari 1860, dan pada saat itu *Bonthain* tergabung dalam distrik-distrik timur.
- Di bagian Selayar, dulu termasuk bagian dari *Bonthain*, wilayah ini diserahkan kepada Ternate oleh Gowa berdasarkan pasal 17 perjanjian bongayya. Namun pada akhirnya diambil alih oleh VOC pada tahun 1689.³²

Pada permulaan abad XIX, Hindia Belanda menggantikan kompeni. Dengan berkuasanya Hindia Belanda, maka pada 1824, pemerintah Hindia Belanda menata pemerintahan di daerah-daerah yang dinyatakan berada dibawah Hindia Belanda. Makassar dan daerah bawahannya (*Gouvernement Makassar en Onderhoorigheden*) dibagi dalam lima wilayah administrasi pemerintahan yaitu Makassar, distrik-distrik bagian selatan, distrik-distrik bagian utara, *Bonthain* dan Bulukumba, dan Selayar.³³

Pada tatanan administrasi Hindia Belanda tahun 1900 an, daerah-daerah dibagi dalam dua sistem yang berbeda, politis dan administratif. Secara politis, ada wilayah pemerintah di bawah pemerintahan langsung, dan negara-negara pribumi di bawah pemerintahan tidak langsung. *Bonthain* berada dalam kekuasaan administratif yang wilayahnya di bawah pemerintahan langsung. Dalam artian rakyat tunduk langsung pada pemerintah pusat dan seluruh sistem pemerintahan berasal dari Belanda.³⁴

Penguasaan Hindia Belanda terhadap daerah-daerah di Sulawesi Selatan terus berlanjut. Pada tahun 1905 Sulawesi Selatan seluruhnya telah ditaklukan dan berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Perubahan struktur pemerintahan kembali dilakukan,

³² Haan, *Memorie Van Overgave Afdeeling Bonthain Maart 1931-April 1932*, 2.

³³ Nur, Dkk, *Sejarah Bonthain*, 177.

³⁴ J. S. Furnivall, *Netherlands Indie A Study of Plural Economy* (Jakarta: Freedom Institute, 2009), 274.

pemerintahan Sulawesi dan daerah bawahan (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*) dibagi ke dalam tujuh bagian pemerintahan (*Afdeeling*) yaitu: Makassar, *Bonthain*, Bone, Parepare, Luwu, Mandar, dan Buton, dan Pesisir Timur Sulawesi secara resmi pada tahun 1911.³⁵

Pengaruh pemerintahan dan kekuasaan Belanda mulai meluas hingga ke daerah terkecil. Baik di desa-desa maupun di kampung-kampung. Masa itu juga ditandai dengan perubahan struktur pemerintahan. Kerajaan-kerajaan sekutu dilenyapkan dan wilayahnya beralih di bawah pemerintahan dan kekuasaan langsung. Pemerintah Hindia Belanda mengajukan dan menetapkan bentuk pengaturan wilayah administrasi pemerintahan baru. Bagian pemerintahan dibagi ke dalam beberapa cabang pemerintahan (*Onderafdeeling*). Pada setiap cabang pemerintahan terdapat seorang Kontrolir (*controleur*) untuk melaksanakan pemerintahan dan kekuasaan.³⁶

Berdasarkan penataan peraturan pemerintahan yang telah diatur dalam staatsblad 1910. No.573, setiap cabang pemerintahan dibagi ke dalam beberapa wilayah administrasi pemerintahan yang disebut distrik. Di wilayah distrik inilah berfungsi seorang pejabat bumiputra. *Afdeeling Bonthain* terbagi atas lima *Onderafdeeling* yaitu Djenepono, Boeloekumba, Sindjai, Saleleir, dan *Bonthain*.

Afdeeling Bonthain dipimpin oleh seorang Asisten Residen, yang berkedudukan di *Bonthain*. Ada lima *Onderafdeeling* dan membawahi beberapa distrik.

- *Onderafdeeling Bonthain*, terdiri dari distrik-distrik *Bonthain*, Taroang, dan Malakadji, di bawah Asisten Residen, kepala divisi, yang dibantu oleh seorang Kontrolir di bidang pemerintahan dalam negeri yang berkedudukan di *Bonthain*.
- *Onderafdeeling Djenepono*, terdiri dari distrik-distrik Laikang, Bangkala, Binamoe, dan Aroengkeke, dibawah seorang gubernur sipil, yang berkedudukan di Djenepono.
- *Onderafdeeling Boeloekoemba*, terdiri dari distrik-distrik Boeloekoemba Toa, Gantarang, Oedjoengloe, Kondang, Bira, dan Kadjang, dibawah seorang Asisten Residen, yang berkedudukan di Boeloekoemba.
- *Onderafdeeling Sindjai*, terdiri dari distrik-distrik boelo-boelo Timur, Lamati, Tondong,

³⁵ Poelinggomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, 83-84.

³⁶ *Ibid*, 84

Boelo-Boelo Barat, Manipi, toeroengan, Manimpahoi, dan Pao, dibawah seorang residen yang berkedudukan di Sindjai.

- *Onderafdeeling Salelier*, terdiri dari distrik-distrik Tanete, Batangmata, Boekit, Bonea, Bontobangoeng, Pulau Pasi, Balaboelo, Lajolo, Barang-barang, Benteng, Tambolongang, Kapoedi, Bonerate, Djampea, Kalao, Lambego, Kalao Toa, Madoe, dan pulau-pulau lainnya, dengan pusat pemerintahan di Benteng.³⁷



Gambar 2.3. Kantor Asisten Residen *Bonthain* 1900-1930, (Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/imagecollection-kitlv>)

Masuknya pengaruh kolonial membawa perubahan pada sistem pemerintahan. Terjadi pergeseran dari sistem kakaraengang menjadi sistem pemerintahan kolonial. Setiap pejabat yang ada dan menduduki jabatan dalam dewan adat diberi penugasan sesuai kebutuhan pemerintahan kolonial. Peran Belanda dalam pemerintahan lebih nyata terlihat dalam pemerintahan dengan menjadikan kerajaan *Bonthain* sebagai *Onderafdeeling* pada tahun 1906. Meskipun perubahan terjadi, karaeng atau raja tetap diakui oleh Belanda sebagai kepala pemerintahan di wilayahnya dan diberi gelar *Regent Van Bonthain*. Ia diakui

³⁷ Staatsblad, 1911, 2.

sebagai kepala adat di samping pemerintahan Belanda sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah *Onderafdeeling*.³⁸

Proses pemilihan raja atau *Regent* dipilih oleh dewan adat yang telah diberikan wewenang oleh pemerintah kolonial. Dewan adat tersebut membawahi beberapa daerah bawahan yang terdiri dari daerah yang termasuk dalam adat *sampulo ruwa*, daerah adat Tompobulu, dan daerah bawahan tertentu yang disebut *Lili*. Secara struktur pemerintahan daerah-daerah ini sama meskipun ada sedikit perbedaan. Daerah adat pertama misalnya, merupakan gabungan dari beberapa daerah yang dikepalai oleh kepala adat yang bergelar *Djannang*. Mereka membawahi beberapa daerah yang lebih kecil yang dikepalai oleh seorang pemimpin yang disebut *Anrong Tau*.³⁹

Pada tahun 1916 terjadi perubahan pemerintahan Sulawesi dan dependensinya. *Bonthain* yang awalnya terdiri dari lima *Onderafdeeling* mengalami perubahan menjadi empat *Onderafdeeling*. Menurut *staatsblad* 1916 no. 352 Jeneponto yang dulunya berada dibawah naungan *Afdeeling Bonthain*, kemudian berpindah menjadi daerah dibawah naungan *Afdeeling Soengominasa* bersama dengan *Onderafdeeling Takalar*. Selain itu, *Bonthain* yang awalnya terdiri dari tiga distrik yaitu *Bonthain*, Tarawang, dan Malakadji, setelah aturan tersebut keluar hanya menjadi satu distrik saja yaitu distrik *Bonthain*.⁴⁰

Peraturan mengenai tatanan administratif dibawah pemerintah Hindia Belanda telah berulang kali diubah. Selain berbagai perubahan yang tercantum dalam *staatsblad*, perubahan besar terjadi pada tahun 1924. Pada masa pemerintahan Gubernur Couvreur terjadi penggabungan antara *Bonthain* dan Bulukumba. Namun penggabungan tersebut dibatalkan pada tanggal 1 Januari 1930.⁶⁷

³⁸ Laely, *Sistem Pemerintahan Kolonial Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*, 77.

³⁹ *Ibid*, 78

⁴⁰ *Regeerings-Almanak Voor Nederlandsch-Indie*, (Landsbukkerij Weltevreden, 1923), 157.

Pemisahan kedua *Onderafdeeling* tersebut pada tahun 1930 membawa perubahan besar kepada keduanya. *Bonthain* dan Bulukumba menjadi daerah yang jauh lebih besar dan bukan lagi daerah yang homogen dibawah satu pengawas atau kontroler. Penggabungan dihentikan dikarenakan penggabungan keduanya terlalu berat bagi seorang inspektur, sehingga penggabungan dihentikan.⁴¹

Di *Bonthain*, kelas intelektual masih belum ada sama sekali. Perdagangan dan bisnis pun belum mengarah pada organisasi ekonomi, apalagi politik. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, hal ini disebabkan oleh penduduk itu sendiri. Penduduk cenderung tidak menunjukkan minat untuk menjaga kepentingan umum. Seorang kepala harus membuat kesalahan yang sangat besar terlebih dahulu sebelum penduduk memutuskan untuk melaporkannya. Contohnya dalam hal penggelapan pajak, hampir tidak ada laporan yang masuk tentang kasus ini. Pegawai administrasi eropa yang bekerja tidak bisa membantu banyak dikarenakan keterbatasan dalam hal bahasa.⁴²

Penyebab kedua yaitu munculnya tipe *etat gendarme* dari masyarakat hukum adat. Hal itu merupakan upaya Gubernur Couvreur untuk mengemansipasi para kepala adat, yaitu *karaeng*, *aroe*, dan *gallarang* sekaligus membatasi kewenangan asisten administratif. Namun, upaya yang dilakukan Gubernur Gouvreur tidak berjalan dengan baik. Kebijakan ini justru membuat beberapa kepala adat kehilangan fungsinya sebagai pemimpin. Mereka digantikan oleh pejabat administratif yang bekerja keras dibawah tekanan berat dari pemerintah Eropa, namun seringkali tidak memenuhi standar yang diharapkan.⁴³

“Etat Gendarme adalah sebuah konsep dari bahasa Prancis yang secara harfiah berarti “negara polisi”. Dalam konteks ilmu politik dan ekonomi, istilah ini merujuk pada jenis negara yang membatasi perannya hanya pada fungsi-fungsi dasar dan esensial”

Departemen Bonthain, secara khusus telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas para kepala adat. Ini termasuk gagasan yang dilakukan secara bertahap untuk membebaskan kepala masyarakat hukum adat dari bagian pekerjaan mereka. Namun,

⁴¹ Haan, *Memorie Van Overgave Afdeeling Bonthain Maart 1931-April 1932*, 2.

⁴² *Ibid*, 3.

⁴³ *Ibid*, 4

hanya sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh kepala adat dengan konsisten. Contohnya, dalam hal pemungutan pajak, sebagian besar waktu kerja kepala dihabiskan untuk pengumpulan pajak. Ketika para kepala yang lebih rendah mengambil pekerjaan ini, kepala masyarakat hukum akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk pekerjaan lain demi kemajuan wilayahnya.⁴⁴

Setelah dikuasai, pemerintah Hindia Belanda memposisikan struktur tradisional *Bonthain* menjadi *adatgemeenschap Bonthain* (Komunitas Adat *Bonthain*) dan raja *Bonthain* diberi gelar sebagai *Regent van Bonthain*. Adapun struktur dibawahnya yaitu:

- *Daeng Tompobulu*, yang memimpin pemerintahan dan menguasai komunitas adat Tompobulu
- *Gallarang Bonthain*, menguasai 12 kampung dan 14 kepala kampung *Bonthain*.
- *Soelewatang*, yang mengelolah seluruh *Bonthain*.

Perubahan pada struktur pemerintahan *Bonthain* setelah dikuasai langsung oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu:

- Hadat 12 dibawah perintah *Gallarang Bonthain*
- Tompobulu dibawah perintah *Daeng Tompobulu*
- *Lili* dibawah pemerintah *Karaeng Bonthain*

Tabel. 2.2. Kampung-kampung dibawah naungan *Gallarang Bonthain*, *Daeng Tompobulu*, dan *Lili*

Hadat 12	Tompobulu	Lili
Letta	Biangloe	Tappandjeng
Tanga-tanga	Taroetteo	Lembang Tjina

⁴⁴ *Ibid*, 4.

Bissam <i>Pole</i>	Kaloling	Lembang
Kaili	Nipa-nipa	Pasorongi
Tinotowa	Rappowa	Lasepang
Sasaja	Gantarangkeke	Biangkeke
Boengloe	Lembang Gantarangkeke	Panaikang
Lemowa	Banjarah	Lumpangang
Boddong	Tjampaga	Loka
Tjedo	Balangkabbong	Batulanggaja
Mappilawing	Pattaneteang	Lanyying
Gallea	Lonrong	Boekang Paliang
	Bonto Tappalang	Batoe
	Sinowa	Tjidondong
	Moti	Parring-parring
		Onto
		Ganting
		Ereng
		Tala tala
		Tamaona
		Talakaja
		Goesoeng

Sumber: Inventaris Arsip *Bonthain* 1866-1973, No.Reg.16, *Kegiatan Pemerintahan di Daerah Bonthain 1927*, Dinas Perpustakaan dan Arsip Sulawesi Selatan.

Selain itu, tanah ongko yang dulunya milik karaeng *Bonthain* dibagi-bagi untuk dikelola. Ada empat *Djannang romang* yang bertugas mengelolah ongko, mereka bertugas mengumpulkan *soesung romang* (pembayaran hasil hutan) dan *thesang* (pembayaran dari tanah yang dibagi). Sama seperti kepala kampung mereka tidak mendapatkan keuntungan

dan tidak menerima gaji untuk mengumpulkan pajak. Namun, mereka dibayar sepertiga dari hasil *thesang* dan *soesung romang* yang mereka kumpulkan.⁴⁵

Dibawah kepemimpinan karaeng sebelumnya, Karaeng Pawiloi telah menugaskan fungsi *Djannang romang* kepada para kepala kampung. Karena hal tersebut, mereka telah menikmati keuntungan dari posisi dan biaya pengumpulan pajak, sehingga Karaeng Pawiloi tidak merasa perlu memberikan mereka bagian dari keuntungan ongko. Wajar jika *Djannang romang* tidak terlalu peduli dengan pengelolaan ongko karena mereka tidak menerima gaji khusus dalam menjalankan tugasnya. Bukan hanya mereka, semenjak dikuasai oleh Hindia Belanda Karaeng Pawiloi juga tidak menerima sepeserpun dari tanah ongko.⁴⁶

Semua yurisdiksi adat di *Bonthain* memiliki kasnya sendiri. Penerimaan terdiri dari pendapatan adat, pendapatan pasar, dan biaya layanan kota. Ini semua adalah dana yang dibutuhkan dan tidak dapat dilakukan tanpa subsidi yang cukup besar dari kas negara untuk membayar petugasnya dengan layak. Pendapatan kepala departemen *Bonthain* sangat buruk, sehingga ketika mengetahui pengumpulan pajak nasional tidak akan dikurangi menjadi suatu keberuntungan.⁴⁷

Pemerintah adat menerima gaji mereka dari kas. Gaji yang mereka terima dari kas, menggantikan pendapatan dalam bentuk barang yang semula mereka peroleh langsung dari hak-hak atas properti komunitas hukum yang disebut kepemilikan ornamen. Para kepala kampung yang jabatannya lebih rendah mendapatkan penghasilan dari pendapatan pertanian kepemilikan ornamen. Banyak kepala kampung dari komunitas adat *Bonthain* dapat hidup layak dari pendapatan tersebut.⁴⁸

Selain pada tatanan pemerintahan, pasca ekspedisi militer Belanda perubahan juga terjadi yang berkaitan dengan tanah-tanah pertanian dan pembangunan infrastruktur.

⁴⁵ *Ibid*, 7.

⁴⁶ *Ibid*, 7.

⁴⁷ *Ibid*, 6.

⁴⁸ *Ibid*, 6.

Pengaturan tanah-tanah di *Bonthain* yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terkait dengan kebijaksanaan penarikan pajak tanah dan pajak pertanian serta penanaman tanaman komersil sebagai pemasukan pemerintah Hindia Belanda. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah pengaturan luas dan kepemilikan tanah.⁴⁹

2.3. Kondisi Geografis *Onderafdeeling Bonthain*

Dalam historiografi Nusantara, *Bonthain* merupakan salah satu wilayah yang namanya disebut dalam Nagarakertagama yang ditulis pada abad XIV Masehi. Dalam Nagarakertagama, *Bonthain* salah satu dari tiga pusat utama yang ada di Sulawesi Selatan pada masa itu, seperti pada kutipan, “*Muwah tanah I Bantayan pramuka Bantayan len Luwuk teken Udha makatrayadh*” dalam Indonesia berarti “Juga tanah Bantayan yang terpenting adalah Bantayan dan juga Luwuk sampai dengan Udamakatraya yang unggul”.

⁵⁰

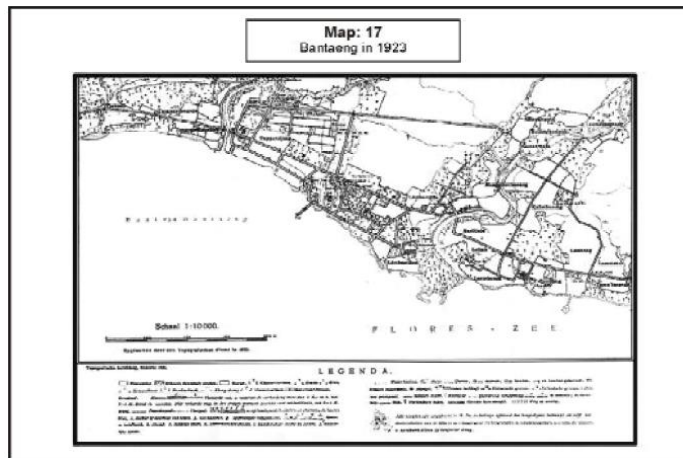
Bantayang berasal dari kata *bantai* dan *an* yang secara harfiah mengandung makna pembantain atau penyembelihan. Tidak ada penjelasan lain tentang makna dari kata *Bantayan*. Perubahan nama *Bantayan* menjadi *Bonthain* dimulai pada tahun 1737. *Bonthain* dikenal dengan julukan *Butta Toa* yang berarti tanah tua. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi *Bonthain* telah ada sejak zaman dulu. Disebutnya *Bonthain* dalam naskah Nagarakertagama, memberikan legitimasi secara tidak langsung bahwa *Bonthain* masuk dalam peta politik dan ekonomi di Nusantara yang juga berpengaruh pada peran strategisnya dalam perniagaan antar pulau di seluruh Nusantara. Daerah *Bonthain* tergolong kecil tapi sangat penting dalam sejarah awal Sulawesi Selatan. Komandan VOC yang menargetkan *Bonthain* selama proses penyerangan ke Makassar menggambarkan

⁴⁹ *Ibid*, 7.

⁵⁰ Rahmaatia Ayu Widyaningrum, “Dari Makkah ke Bonthain: Potret Sosial Bonthain Abad XX dalam Naskah Catatan Harian Haji Abdul Rahman” *Manuskripta*, Vol.14, No.2, (2024), 243.

bahwa *Bonthain* adalah kota yang makmur dan merupakan kota penghasil beras bagi Makassar.⁵¹

Bonthain merupakan salah satu daerah dari *Gouvernement Celebes* yang terletak pada 5° 33' 46" Lintang Selatan dan 121° 0' 30" Bujur Timur di pesisir semenanjung Sulawesi. Pulau ini terletak sejajar dengan pantai sepanjang 3 kilometer.⁵² Di bagian selatan



Peta. 2.2. Peta *Bonthain* 1923 (Sumber: Widya Nayati, *Social Dynamics and Local Trading Pattern in the Bonthain Region, South Sulawesi (Indonesia) circa 17th century*, University of Singapore, 2005)

Bonthain, laut menjorok ke daratan membentuk dua teluk besar yaitu Teluk *Bonthain* dan Teluk Biang Keke. Sejumlah sungai kecil yang digunakan untuk irigasi mengalir hingga laut. Di sebelah barat, di jalan utama menuju Makassar, terdapat *Onderafdeeling* Jeneponto. Di sebelah timur *Bonthain*, terdapat sungai kecil yaitu sungai Biroro yang menjorok ke laut, sekaligus sebagai batas *Onderafdeeling* *Bonthain* dan Bulukumba. Sebelah utara *Bonthain*

⁵¹ Akin Duli, "Reflection on the social and cultural aspects of the megalithic site of Onto, Bonthain, South Sulawesi", *Australian National University Press*, 315.

⁵² T.J. Bezemer, *Beknopte Encyclopaedie Van Nederlandsch Indie (N.V.E.J. Brill, Leiden, 1921)*, 77.

menjulang puncak *Bonthain* dengan produk utamanya adalah beras, jagung, kopi, sayuran, dan buah-buahan serta banyak sungai kecil.⁵³

Onderafdeeling Bonthain terletak di kaki pegunungan dengan pantai yang terhampar sepanjang jalan. Di tepi pantai terdapat deretan rumah-rumah dari batu, bambu atau kayu, beberapa diantaranya berlantai dua. Di daerah pedalaman terdapat berbagai kampung.⁵⁴ Suasana *Bonthain* pada 1905 di dataran rendah, terdapat perkampungan yang padat. Rumah-rumah masyarakat di dataran rendah sebagian besar dikelilingi oleh pagar tanaman. Sedangkan di daerah yang lebih tinggi, rumah-rumah masyarakat lebih tersebar dan pekarangan rumah dipisahkan oleh tembok-tembok tinggi setinggi 1 Meter yang terdiri dari batu-batu yang ditumpuk secara longgar.⁵⁵



Gambar 2.4. Gunung Lompobattang,

(Sumber: <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/imagecollection-kitlv>)

⁵³ G. Storm, *Leerboek Der Aardrijkskunde Van Nederlandsch Indie* (De Koninklijke Militaire Academie, 1911), 197.

⁵⁴ *Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel* (Netherland: Mouton), 299.

⁵⁵ Menre, *Om En Bij Bonthain* (Gravenhage: Het Nederlandsche Zeewezen, 15 Juni 1905), 184.

Terdapat gunung Lompobattang dengan tinggi mencapai 2874 Meter. Gunung ini juga biasanya disebut sebagai puncak *Bonthain*, sebuah gunung api yang sudah lama tidak aktif. Lompobattang ditumbuhi oleh pepohonan yang sangat lebat namun bagian atasnya gundul. Di sisi pegunungan terdapat jurang-jurang yang dalam dengan hutan yang lebat, banyak air terjun kecil, dan sungai-sungai kecil. Sungai-sungai tersebut mengalir disepanjang lereng kemudian berkelok-kelok di antara hijaunya sawah. Di sekitar pantai terbentuk rawa-rawa kecil yang ditumbuhi pohon nipah. Dataran sawahnya jauh dari kesan monoton, ada banyak kampung yang dikelilingi oleh pepohonan hijau.⁵⁶

Salah satu air terjun yang bisa ditemui di *Bonthain* yaitu air terjun Bisappu dengan ketinggian 80 M. Namun perjalanan untuk sampai pada kaki air terjun harus melewati dasar sungai dan pendakian yang lumayan melelahkan. Disana, terdapat bebatuan yang besar serta dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang rindang.



Gambar 2.5. Air Terjun Bisappu 1905 (Sumber: Menre, *Om En Bij Bonthain*, Gravenhage: Het Nederlandsche Zeewezen, 15 Juni 1905)

Sungai-sungai yang termasuk dalam wilayah *Bonthain* adalah sungai tanga-tanga, Lette, Pasorong, Lumpangan, Panaikang, Biangkeke, Nipa-nipa, dan Kalimassang yang bermuara di pesisir pantai. Sungai terbesar di *Bonthain* yaitu Sungai Panaikang, yang memiliki lebar sekitar 10 Meter. Namun, tidak satu pun dari sungai-sungai tersebut dapat

⁵⁶ *Ibid*, 181.

dilayari pada jarak yang cukup jauh, tetapi muara sungai-sungai tersebut menghasilkan udang yang melimpah pada saat air pasang.⁵⁷

Bonthain memiliki tanah yang subur dan merupakan salah satu daerah terbersih di Sulawesi Selatan. Di tanah yang datar pada kaki pegunungan dan sepanjang pantai, banyak ditanami padi. Di pegunungan tumbuh-tumbuhan banyak ditanam seperti kentang, kubis, kacang-kacangan, dan sayuran lainnya yang tumbuh melimpah.⁵⁸

Tanah yang subur dipengaruhi oleh iklim *Bonthain* yang sehat, meskipun suhu bisa mencapai hingga 90 derajat. Curah hujan tahun rata-rata berkisar 1328 Milimeter.

Tabel. 2.3. Distribusi Curah Hujan *Bonthain* 1906

Bulan	Curah Hujan
Januari	140 Mm
Februari	116 Mm
Maret	129 Mm
April	128 Mm
Mei	193 Mm
Juni	201 Mm
Juli	130 Mm
Agustus	44 Mm
September	31 Mm
Oktober	48 Mm
November	72 Mm
Desember	96 Mm

Sumber: Zeemangids Voor Den Oost Indische 1906

⁵⁷ P.N. Van Kampen, *Woordenboek Van Nederlandsch Indie* (Amsterdam, Eerste Deel, 1861), 195.

⁵⁸ *Ibid*, 196.

Iklīm *Bonthain* pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September disebut iklim musim timur menghasilkan udara yang sejuk dikarenakan ada angin laut yang kencang. Bulan-bulan lainnya menghasilkan cuaca yang hangat dan panas. Pada musim kemarau yang berudara panas, orang-orang terkhusus masyarakat di tepi pantai sering kali ke Loka yang berjarak 12 Kilometer dari kota *Bonthain* untuk merasakan udara yang lebih dingin.⁵⁹

Karena topografi *Bonthain* yang terdiri dari pesisir dan pegunungan, maka masyarakat di daerah pesisir umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satu sumber pendapatan penduduk dan mayoritas masyarakat pesisir kerjakan adalah memancing. Keterampilan nahkoda dari penduduk pesisir terutama terlihat pada saat bongkar muat barang. Jangkar salah satu kapal *Paketvaart* hampir tidak pernah jatuh. Bahkan mereka mengangkat ternak, peti-peti besar, yang dilakukan dengan ketangkasan. Sedangkan masyarakat pegunungan hidup dari hasil kebun seperti jagung, kentang, dan kubis. Selain itu, tersedia banyak bambu dan kayu sehingga sering kali terjadi perdagangan bambu dan kayu di daerah pegunungan. Di hutan terdapat banyak babi hutan, yang bisa didapatkan dengan harga murah.⁶⁰



⁵⁹ N.V. Boekh, *Handboekje Den Onderofficier Van Het Nederlandsch Indische* (Bandoeng, 1929), 222.

⁶⁰ *Weekblad Van Nederlandsch Indie*, (No.15, 16 November 1917), 577.

Peta.2.3. Peta Topografi *Bonthain* 1924 (**Sumber:** Arsip Nasional Republik Indonesia, Seri Citra Daerah: No.10)

Bonthain juga merupakan lokasi seorang Asisten Residen menetap. Lokasinya yang berada di tepi laut dan memiliki pelabuhan membuat kapal-kapal *Paketvaart* secara teratur mengunjungi *Bonthain*. Pada ketinggian 1000 Meter, yang dapat diakses dengan mobil terletak desa Lokka dengan pasanggrahan yang bagus.⁶¹

Selain kapal *Paketvaart*, beberapa kali dalam setahun, kapal-kapal besar berlabuh di *Bonthain*, salah satunya yaitu perahu Mandar, dinamakan perahu mandar karena awak kapalnya adalah orang Mandar. Para pedagang membeli barang dagangan mereka seperti piring-piring, katun, kain sutra, dan berbagai kebutuhan rumah tangga. Transportasi yang digunakan masyarakat untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain atau untuk mengangkut hasil alam ke tepi pantai dengan menggunakan kuda-kuda milik penduduk asli. Dahulu, *Bonthain* memiliki kuda-kuda yang besar dan kuat. Namun digunakan sebagai transportasi di umur yang sangat muda, maka jenisnya menurun drastis.

2.2. Demografi *Onderafdeeling Bonthain*

Gubernemen Sulawesi yang terdiri dari beberapa daerah bawahan seperti Takalar, Maros, Bone, Sinjai, *Bonthain*, Toraja, dan lainnya, yang di huni oleh suku Toraja, Bugis, Makassar, dan Mandar. Orang-orang Bone dan Pinrang mayoritas bersuku Bugis, Takalar, Gowa, *Bonthain*, Maros, Jeneponto dikelompokkan ke dalam suku Makassar, penduduk Makale dan Rantepao mayoritas bersuku Toraja. Namun, ada beberapa daerah yang perlu ditelusuri lebih jauh asal-usulnya.⁶²

⁶¹ Prof. Dr. A. W. Nieuwenhuis, Dkk, *Tropisch Nederlandch Indie*, (Veertiendaagsch Tijdschrift Ter Verbreiding Van Kennis Omtrent Nederlandsch Oost- En West Indie, 1928), 107.

⁶² Volkstelling 1930, *Census Of 1930 in The Netherlands Indies*, (Batavia: Departement Van Economische Zaken, 1936).

Bonthain salah satu daerah bawahan *Gubernemen* Sulawesi yang mayoritas penduduknya bersuku Makassar, namun ada campuran dari suku bugis, orang Eropa dan Cina.

Tabel.2.4. Populasi persebaran suku di *Onderafdeeling Bonthain* 1930

Suku	Laki-laki	Perempuan	Lainnya
Makassar	26.832	27.234	54.066
Bugis	2045	1792	3837
Toraja	11	7	18
Selayar	10	19	29

Sumber: *Volkstelling* 1930

Keberadaan orang Bugis di *Bonthain* adalah keturunan orang-orang yang melarikan diri dari Distrik Bone dan Wajo pada tahun-tahun sebelumnya, mereka sebagian besar tinggal di pusat kota *Bonthain*. Di daerah pegunungan tinggal sejumlah besar keturunan Maiwa (penduduk lanskap Maiwa yang termasuk subdivisi Enrekang), kepindahan orang Maiwa ke daerah pegunungan *Bonthain* pada paruh pertama abad terakhir disebabkan karena terpicat oleh keunggulan kopi.⁶³ Populasi masyarakat Makassar dan Bugis mendominasi di *Bonthain*, namun juga bisa ditemukan orang Selayar dan Toraja walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding suku Bugis dan Makassar.

Pada tahun 1920 jumlah keseluruhan penduduk *Bonthain* 43.989, dengan jumlah pribumi sebanyak 43.586. Rekapitulasi ini adalah berdasarkan hasil sensus penduduk di bulan November 1920. Data dibawa merupakan keseluruhan penduduk *Bonthain* di tahun 1920 yang terbagi kedalam dua distrik yaitu distrik *Bonthain* dan Taroang.

Tabel.2.5. Jumlah Penduduk 1920

<i>Onderafdeeling</i>	Inlanders	Eropa	Cina	Lainnya
-----------------------	-----------	-------	------	---------

⁶³ Gravenhage and Martinus Nijhoff, *Adatrechtbundels XXXVI: Borneo, Zuid Celebes, Ambon Enz* (Bezorgd Door De Commissie Voor Het Adatrecht En Uitgeven Door Het Koninklijk Instituut Voor De Taal Land En Volkenkunde Van Nederlandsch Indie, 1933), 154.

Bonthain				
Perempuan	19.546	60	131	1
Laki-laki	24.040	39	172	

Sumber: *Nederlandsch Indie Volkstelling 1920*

Tabel.2.6. Jumlah Pembagian Penduduk Setiap Distrik

Onderafdeeling Bonthain	Inlanders	Eropa	Cina	Lainnya
Distrik <i>Bonthain</i>	40.747	99	303	1
Distrik Taroang	2.839	-	-	-

Sumber: *Nederlandsch Indie Volkstelling 1920*

Secara keseluruhan pada kedua distrik ini didominasi oleh pribumi. Di distrik *Bonthain* tercatat ada 40.747 penduduk pribumi, 99 orang Eropa, 303 orang Cina, dan 1 orang dari kelompok lainnya. Sedangkan di distrik Taroang tercatat hanya ditinggali oleh penduduk pribumi saja, tidak tercatat adanya penduduk non pribumi.

Tabel.2.7. Jumlah penduduk 1930

Onderafdeeling Bonthain	Inlander	Eropa	Cina	Lainnya
	64.319	90	370	24

Sumber: *Volkstelling 1930*

Jika berdasarkan tabel jumlah penduduk tahun 1920 dan 1930, jumlah penduduk di *Bonthain* pada tahun 1930 bertambah pesat dibanding 1920. Jumlah pribumi meningkat pesat sebanyak 20.733 orang. Beberapa penyebab meningkat penduduk *Bonthain* pada tahun 1930 adalah karena pertumbuhan penduduk dan migrasi. Pada tahun 1930 tercatat ada 1.124 orang yang bermigrasi ke *Bonthain*.⁶⁴

Selain penduduk asli terdapat juga penduduk Eropa murni dan Tionghoa. Orang Tionghoa hingga kini menjadi penduduk yang mendominasi perekonomian di sektor perdagangan di *Bonthain*. Kedatangan orang Tionghoa diperkirakan telah ada di *Bonthain*

⁶⁴ *Volkstelling 1930, Census Of 1930 in The Netherlands Indies*, 50.

sejak berabad-abad yang lalu, hal ini ditandai dengan ditemukannya beberapa peninggalan yang berasal dari dinasti yang berkuasa di Cina. Daerah yang diduga sebagai pemukiman awal orang Tionghoa yaitu Lembang Cina.⁶⁵

Orang Tionghoa di *Bonthain* memiliki tempat tersendiri atau distrik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Distrik Tionghoa berbatasan dengan kampung Lembang Tjina dan Letta. Dominasi orang Tionghoa lebih banyak di pusat utama kota *Bonthain*.⁶⁶ Orang Tionghoa juga menjadi konsumen untuk perdagangan kopi yang ada dipedalaman ke pesisir dengan kuda dan dibawa ke Makassar menggunakan *piroque*.⁶⁷

2.3. Kepercayaan

2.3.1. Kepercayaan Patuntung

Kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan sebelum masuknya agama Islam merupakan kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan roh atau kepercayaan terhadap roh nenek moyang (*Animisme*). Dalam masyarakat *Bonthain* dikenal kepercayaan *Patuntung*. Kepercayaan *Patuntung* yang dapat diartikan sebagai penuntun. Pandangan patuntung tentang Tuhan pada prinsipnya terbagi atas 3 jenis dan masing-masing memiliki pengaruh terhadap hidup dan kehidupan Manusia. Selain itu, masyarakat percaya bahwa setiap tempat, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tertentu dihuni oleh kekuatan gaib, terutama tempat yang dianggap keramat.⁶⁸

⁶⁵ Ikbal, Dkk, "Orang Tionghoa Di Bonthain 1998-2019", *Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 22, No.2, (2024), 57.

⁶⁶ C. J. L. W. Eekhout, *Gewestelijke Verordeningen Voor Celebes En Onderhoorigheden* (Macassar: Brehme and Verdouw, 1892), 21.

⁶⁷ O.M. De Munnick, *Mijn Ambtelijk Verleden 1858-1894* (Oud Zeeofficier En Oud Indisch Ambtenaar, Amsterdam, 1912), 78.

⁶⁸ Lukman, Najamuddin, Patahuddin, "Kerajaan Gowa dan Proses Islamisasi di Kerajaan Bonthain 1607-1887" *Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah*, Vol.19, No.2, (2021), 149.

Ada tiga dasar kepercayaan dalam agama *Patuntung*, yaitu percaya kepada seorang dewa sebagai cikal bakal keturunan penguasa, percaya kepada roh atau jiwa yang menempati beberapa tempat dalam alam semesta ini, dan percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda pusaka buatan manusia. Kepercayaan kepada dewa dengan atribut batu sisa megalitik menandakan bahwa agama *Patuntung* merupakan kebudayaan tertua.⁶⁹

Kepercayaan *Patuntung* mempercayai adanya roh atau jiwa yang mendiami tempat-tempat keramat seperti pohon besar dan batu keramat. Karena roh dan jiwa tersebut dapat mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari, maka untuk mendapatkan perlindungan dilakukan kegiatan *Attoanna*, yaitu persembahan sesajen. Terakhir, pemujaan terhadap kekuatan gaib yang terdapat pada benda-benda pusaka. Pada keluarga kerajaan, pusat kekuatan gaib berada pada benda-benda pusaka warisan *Tumanurung* yang dinamakan *kalompoang* dan *gaukang*. Menurut Kooreman, *gaukang Tumanurung Bonthain* adalah sebuah patung emas kecil berbentuk manusia dengan alat vital laki-laki yang besar dan memiliki satu kaki.⁷⁰

2.3.2. Masuknya Islam

Proses Islamisasi di kerajaan *Bonthain* terkait dengan rancangan pemerintah kerajaan Gowa yang menempatkan kerajaannya menjadi pusat syiar Islam di Sulawesi Selatan. Ada tiga proses masuknya Islam di *Bonthain*. Masuknya agama Islam mengacu pada kehadiran seorang atau beberapa orang muslim melalui kontak dagang atau kontak sosial lainnya. Dari prespektif ini, agama Islam dapat dianggap telah masuk *Bonthain* setelah kedatangan seorang pedagang muslim di *Bonthain* sebelum penerimaan agama Islam secara resmi di istana pada abad XVII. Kehadiran seorang pedagang muslim di *Bonthain* mungkin dikarenakan daerah ini sebagai salah satu titik dalam jalur perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur Nusantara.⁷¹

⁶⁹ M. Irfan Mahmud, Dkk, *Bonthain Masa Prasejarah ke Masa Islam* (Makassar: Masagena Press, 2007), 139.

⁷⁰ *Ibid*, 140.

⁷¹ *Ibid*, 149.

Alasan kedua yang memungkinkan menjadi proses masuknya Islam di *Bonthain* adalah terbentuknya komunitas muslim yang menetap dan membangun kultur baru dalam lingkungan non muslim ataupun adanya ulama dan penganut muslim yang sukarela menjadi penyebar agama Islam. Prespektif terakhir yang bisa jadi menjadi alasan masuknya agama Islam di *Bonthain* adalah masuknya agama Islam berdasarkan pengakuan karaeng *Bonthain* sekaligus menjadi anjuran sebagai agama negara. Islamisasi di *Bonthain* tidak lepas dari peranan kerajaan Gowa yang menjadi sekutunya.⁷²

Seperti kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, Islamisasi yang terjadi di kerajaan banyak dilakukan oleh para mubaligh, begitu pun di *Bonthain*. Proses Islamisasi di *Bonthain* dilakukan oleh tiga mubaligh yaitu Syech Nurun Baharuddin Tajul Nakhsabadiyah, La Tenriruwa Sultan Adam, dan Datuk Kalimbungan. Namun tidak berarti Islam baru masuk di *Bonthain* setelah kedatangan tiga mubaligh ini. Kecenderungan yang terjadi di Sulawesi Selatan, termasuk *Bonthain*, Islamisasi lewat penguasa atau raja yang berkuasa.⁷³

Raja *Bonthain* pertama yang memeluk agama Islam adalah Sombaya Ma'jombe Matinroe Ri Jalanjang (raja ke XI). Raja ini menerima Islam tanpa kekerasan dan paksaan. Masuknya beliau ke agama Islam penuh dengan kesadaran dan keyakinan yang tinggi, hal tersebutlah yang membuat masyarakat *Bonthain* yang belum percaya Islam sangat mudah menerima Islam secara damai.⁷⁴

2.4. Struktur Sosial Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat *Bonthain* perbedaan golongan itu diawali oleh adanya penguasaan yang satu dengan yang lainnya, perbedaan semakin jelas dikarenakan adanya konsep *To Manurung*. Dalam kehidupan masyarakat tradisional *Bonthain*, dikenal sistem pelapisan sosial yang berdasarkan keturunan yaitu *Ana Karaeng*, *Tumaradeka*, dan *Ata*.

Ana Karaeng, menempati tingkat tertinggi dalam pelapisan sosial masyarakat *Bonthain*. Pada hakikatnya dalam sistem kemasyarakatan tradisional, semua orang memiliki

⁷² *Ibid*, 150.

⁷³ La Sakka, *Historiografi Islam di Kerajaan Bonthain*, 71.

derajat yang sama, hanya peranan sosialnya yang menempatkan dan membedakan seseorang dengan yang lainnya. Dalam masyarakat *Bonthain Ana Karaeng* merupakan anak atau golongan keturunan raja atau bangsawan. Golongan ini banyak mengendalikan sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi *Bonthain*. Hak tersebut didasarkan pada kenyataan yang berkaitan dengan peran dan wewenang dalam masyarakat. *Ana Karaeng* memiliki perbedaan antar sesama *ana karaeng*, hal tersebut didasarkan atas golongan dari orang tuanya.⁷⁵

Ada empat lapisan *Ana Karaeng*, yaitu pertama, *Ana' Ti'no* atau Anak Karaeng berdarah murni. Golongan ini menyebut dirinya sebagai keturunan langsung dari Tumanurung. Kedua, *Ana' Sipue*, atau bangsawan setengah murni, golongan ini adalah percampuran darah bangsawan dan orang biasa. Ketiga, *Ana' Cera*, golongan ini adalah hasil dari percampuran darah *ana' pattoala*, *ana' manrapi* dengan wanita yang berasal dari golongan *ata* atau budak. Terakhir, *Ana' Karaeng Sala*, golongan ini berasal dari percampuran darah antara *ana' sipue* atau *ana' cera* dengan darah orang kebanyakan, dan darah *ata* (budak).⁷⁶

Lapisan kedua strata sosial dalam masyarakat *Bonthain* yaitu *Tumaradeka*. Golongan ini menempati posisi yang agak longgar dan bebas karena tidak terikat oleh tuntutan kultural. Longgarnya posisi *Tumaradeka* dalam sistem adat menyebabkan golongan ini memiliki kekuatan untuk menjalin hubungan dengan berbagai masyarakat.⁷⁷

Ana Ata adalah lapisan ketiga dalam strata sosial masyarakat *Bonthain*. Golongan ini biasa juga disebut golongan budak atau hamba sahaya dalam konteks tradisi sehingga ruang geraknya terbatas karena terikat oleh syarat aturan wajib yang harus mereka lakukan. Strata sosial ini muncul berdasarkan kepemilikan harta kekayaan atau lahan pertanian yang terbatas sehingga mereka secara sukarela menyerahkan diri kepada penguasa.⁷⁸

⁷⁵ Nur, Dkk, *Sejarah Bonthain*, 17.

⁷⁶ *Ibid*, 18.

⁷⁷ *Ibid*, 19.

⁷⁸ *Ibid*, 19.

Lapisan sosial *ata* dapat terbentuk akibat kekalahan dalam perang juga karena tidak dapat membayar hutang. Mereka bekerja pada tuannya, tanpa mendapat upah, tetapi makan dan tempat tinggal disediakan. Pada saat krisis ekonomi jumlah lapisan ini meningkat sebagai akibat semakin orang yang terlilit hutang. Jika tuannya merasa tidak menanggung hidupnya maka hal inilah yang mendorong terjadinya perdagangan budak.⁷⁹

Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat ketat mempertahankan aturan mengenai pelapisan sosial. Pelapisan sosial dipandang sebagai satu syarat memperjaya negeri. Perbedaan strata sosial dipandang sebagai norma yang patut dipelihara, diikuti, dan dijalankan dalam kehidupan mereka.⁸⁰

Dalam kehidupan sosial, kelompok bangsawan dipandang sebagai kelas yang paling penting. Mereka selalu dipilih untuk menduduki jabatan politik, sehingga sering dipandang sebagai lapisan sosial yang memerintah. Penempatan tersebut berhubungan dengan anggapan masyarakat, bahwa mereka memiliki garis keturunan para dewa. Anggapan ini pula yang mendasari budaya politik mereka sehingga, mereka mendapatkan pemimpin sebagai anugerah dewata sehingga dikenal istilah Tumanurung.⁸¹

Penguasaan Belanda di *Bonthain* juga membawa dampak terhadap struktur sosial. Belanda memperkenalkan sistem kasta yang membedakan antara golongan Eropa, golongan timur asing, dan pribumi. Sistem ini membuat adanya stratifikasi sosial di masyarakat *Bonthain* selain strata sosial tradisional yang telah mengakar kuat. Belanda membagi masyarakat menjadi tiga tingkatan, golongan Eropa ditempatkan di tingkat teratas

⁷⁹ *Ibid*, 20.

⁸⁰ Poelligomang, *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*, 68.

⁸¹ Mukhlis P, Dkk, *Sejarah kebudayaan Sulawesi*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), 66.

dengan hak istimewa, golongan Timur Asing sebagai kelas menengah, dan golongan pribumi sebagai golongan terendah yang sangat terpinggirkan.⁸²

2.5. Pendidikan

Peran agama kristen berpengaruh terhadap pendidikan di *Bonthain*. Pada tahun 1852 misionaris yang bernama Frater Goudswaaiid membuka sekolah untuk anak-anak pribumi di *Bonthain*, yang dihadiri oleh dengan senang hati oleh anak-anak tersebut. Bukan hanya dari *Bonthain* anak-anak dari Bulukumba juga hadir mengikuti sekolah tersebut. Posisi guru diisi oleh tuan Bruder Ponselaar, beliau dengan penuh semangat mengajar bahasa Makassar.⁸³

Ada dua jenis pendidikan formal yang diperkenalkan oleh Pemerintah Belanda, pembagian tersebut didasarkan pada bahasa pengantar yang digunakan oleh sekolah masing-masing. Ada dua bahasa yang dipergunakan yaitu Bahasa Belanda dan Bahasa Daerah. Itu disebabkan oleh perbedaan warna kulit sebagai bentuk diskriminasi terhadap etnik tertentu. Sekolah yang menggunakan bahasa daerah biasanya diperuntukan untuk pribumi, sedangkan sekolah yang menggunakan bahasa Belanda diperuntukan bagi orang-orang Belanda.⁸⁴

Pada tahun 1907 Batavia menganjurkan untuk mendirikan sekolah-sekolah di desa, sekolah tersebut bernama *Volksschool* di beberapa kota utama termasuk *Bonthain*. Walaupun jumlah sekolah per daerah hanya satu hingga tiga sekolah, jumlah murid juga tidak mencapai target, hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Kehidupan penduduk belum pulih dari situasi peperangan.
- b. Penduduk curiga terhadap tujuan pendidikan yang didirikan oleh Belanda.

⁸² Novia Tutasqiyah, Dkk, "Dampak Penjajahan Belanda Terhadap Struktur Sosial di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang*, VOL.3, (2023), 78.

⁸³ M. Wijt dan Zonen, *Mededeeling es Van Wege*, (Het Nederluidische Zendelinggenootsclihp, 1860), 323.

⁸⁴ Junaeda, *Menelisik Jejak Pendidikan Di Sulawesi Selatan: Dari Sistem Pendidikan Tradisional Hingga Sistem Pendidikan Modern*, 5.

- c. Ada pula yang beranggapan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah Belanda, mereka akan dibawa ke Belanda. Karena pada waktu itu keluar negeri dianggap suatu hal yang mengerikan.⁸⁵

Sampai pada tahun 1910, pemerintah Hindia Belanda hanya mengelolah tingkat pendidikan formal yang dinamakan sekolah dasar. Ada dua jenis pendidikan dasar pada waktu itu, yaitu *Inlandsche School* dan *Volkschool*. Di *Bonthain Inlandsche School* dan *Volkschool* juga dibangun. *Inlandsche School* adalah sekolah dengan lama pendidikan yang mesti ditempuh ialah 5 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu. Guru-guru mayoritas berasal dari Sumatera Selatan, ditambah dengan orang bugis dan Makassar.⁸⁶

Berbeda dengan *Inlandsche School*, *Volkschool* dibangun pada setiap desa yang banyak penduduknya. Lama pendidikan yang ditempuh hanya 3 tahun. Mata pelajaran yang diajarkan berupa perhitungan sederhana, membaca (baik itu aksara latin, lontarak, dan bahasa Melayu).

Tabel.2.8. Jumlah Sekolah di *Afdeeling Bonthain*

Pendidikan	Jumlah
Inlandsche School	3
Volkschool	10
Holland Inladsche School	2

Sumber: Sejarah Pendidikan Sulawesi Selatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1980/1981

Di samping *Volkschool* dan *Inlandsche School*, pada tahun 1911 di Makassar dibangun *Holland Inladsche Scholl*. Tahun-tahun berikutnya didirikan di Bulukmba,

⁸⁵ Pawiloy, Dkk, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, 56.

⁸⁶ *Ibid*, 57.

Watampone, Palopo, Parepare, dan *Bonthain*. Kelebihan sekolah ini adalah adanya pemberian bahasa Belanda, bahkan bahasa asing itu menjadi pengantar, terutama pada kelas-kelas lanjutan. HIS *Bonthain* menampung siswa-siswa yang berasal dari Sinjai dan Selayar.⁸⁷



Gambar.2.6. Sekolah Belanda di *Bonthain*, (Sumber: Widya Nayati, Social Dynamics and Local Trading Pattern in the *Bonthain* Region, South Sulawesi (Indonesia), 2005)

Di *Bonthain* terkait dengan kebijakan politik etis, khususnya dalam bidang pendidikan telah didirikan sekolah-sekolah di berbagai distrik. Adapun sekolah-sekolah yang didirikan di *Bonthain* diantaranya adalah sekolah-sekolah kampung, sekolah dasar (*Vervolgcschool* dan *Volksschool*). Di *Bonthain* juga didirikan sekolah HIS dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan bahasa resmi di sekolah tersebut. Disamping sekolah-sekolah tersebut didirikan juga sekolah-sekolah khusus seperti sekolah yang hanya diperuntukkan untuk anak-anak Eropa (*Eropa Europeesche School*), sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa (*Hollands Chineshe Europeesche School*), dan sekolah untuk anak-anak Ambon (*Ambonsche School*). Keberadaan sekolah-

⁸⁷Pawiloy, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, 58.

sekolah tersebut di *Bonthain* memberikan gambaran bahwasanya pemerintah Hindia Belanda telah melakukan beberapa perubahan, terkhusus di bidang pendidikan.⁸⁸

Sejak pemerintahan kolonial perbandingan ruang pendidikan di *Bonthain* yaitu hanya ada satu sekolah untuk setiap 11.000 jiwa. Sedangkan untuk sekolah-sekolah khusus pribumi, hanya ada 8 sekolah untuk keseluruhan atau satu sekolah untuk setiap 45.000 jiwa. Salah satu sekolah yang didirikan oleh orang Eropa HIS, akan segera ditutup. Kebutuhan yang sangat besar untuk pendidikan rakyat, menimbulkan banyak kekurangan. Seperti halnya dalam kinerja administrasi rakyat, kinerja administrasi pendidikan di *Bonthain* sangatlah buruk.⁸⁹

Perkembangan pendidikan Islam di *Bonthain* juga di pengaruhi oleh keberadaan Muhammadiyah. Muhammadiyah mulai menyebar di Sulawesi Selatan pada tahun 1926, sedangkan Muhammadiyah *Bonthain* baru terbentuk di tahun 1927. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah seperti *Standard Scakel School*, *Vervolg School* yang struktur dan kurikulumnya sama dengan sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi ditambah dengan mata pelajaran yang berbasis Islam. Muhammadiyah pertama kali mendirikan amal usahanya di bidang pendidikan pada tahun 1939 yang bernama Madrasah Wustha Muallimin dan *Neutrale Hollandische School* (NHS).

90

⁸⁸ Nahdia Nur, *Sejarah Bonthain*, 260-261.

⁸⁹ C. Boterhoven De Haan, *Memorie Van Overgave Afdeeling Bonthain Maart 1931-April 1932*, 17.

⁹⁰ Pawiloy, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, 92.